



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Temuan BAKN Perlu segera Ditindaklanjuti
Tanggal	: Rabu, 12 Maret 2014
Surat Kabar	: Media Indonesia
Halaman	: 9

## Temuan BAKN Perlu segera Ditindaklanjuti

KETUA Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Sumarjati Arjosos meminta agar temuan BAKN mengenai program tunjangan profesi guru dan program subsidi pupuk segera ditindaklanjuti. Selain diduga berpotensi merugikan negara, buruknya tata kelola di kedua program itu telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Selain ke Ketua DPR, temuan BAKN terkait kedua program ini sudah kita berikan ke semua komisi. Kita harapkan agar komisi bisa segera menyampaikan temuan ini kepada mitra-mitra mereka di pemerintah. Agar bisa segera ditindaklanjuti dan masyarakat tidak resah," ujar Sumarjati di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3).

Dalam penelaahannya, BAKN menemukan bahwa tata kelola program tunjangan profesi guru yang buruk menyebabkan sejumlah kerugian di masyarakat, semisal adanya sisa dana tunjangan profesi guru yang mengendap sebesar Rp 56 triliun pada 2013, ketidaktepatan dalam pencarian dana tunjangan dan kesulitan bagi guru-guru di daerah terpencil untuk memenuhi syarat mengajar 24 jam seminggu.

Tata kelola tunjangan profesi guru di bawah Kementerian Agama (Kemenag) bahkan lebih parah. Menurut Sumarjati,



**Sumarjati Arjosos**  
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI

BAKN menemukan bahwa per 16 September 2013 total tunjangan profesi guru yang terutang di Kemenag telah mencapai lebih dari Rp 3 triliun.

"Di Dirjen Bimas (Bimbingan Masyarakat) Hindu tidak ada tunjangan profesi guru yang terutang. Yang terutang itu ada pada Bimas Islam, Katolik, dan Kristen dengan jumlah guru sebanyak 997.676 orang," ungkapnya.

Dijelaskan Sumarjati, dana tersebut telah ada di kas daerah, namun hingga kini belum dicairkan ke guru-guru yang berhak atas tunjangan tersebut. Ia khawatir dana tunjangan yang mengendap tersebut dikorupsi atau diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Yang jelas saat ini kita tahu banyak kepala daerah di Indonesia itu sudah tersangka korupsi. Kalau itu mengendap di bank, siapa yang dapat bunganya? Selain itu, dana ini juga berpotensi

disalahgunakan untuk pemilukada," cetusnya.

**Pupuk Subsidi**  
Terkait program subsidi pupuk, BAKN menemukan sejumlah hal krusial, di antaranya penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak tepat jumlah dan tidak tepat sasaran, perhitungan harga pokok pupuk bersubsidi yang belum dilakukan secara transparan dan utang pemerintah kepada BUMN produsen pupuk yang mencapai Rp 6,6 triliun pada 2013.

Sumarjati mengatakan, besarnya utang pemerintah telah mengganggu likuiditas perusahaan penghasil pupuk. "Ini juga persoalan serius karena kalau diutangi terus perusahaan jadi kesulitan untuk produksi," ujar politikus Partai Gerindra tersebut.

Terkait buruknya tata kelola program subsidi pupuk, Sumajarti menyarankan agar pemerintah mengubah

preferensi subsidi. Seperti di Jepang dan Vietnam, subsidi tidak lagi dialokasikan untuk pupuk, tapi untuk membeli hasil panen petani dengan harga yang tinggi.

"Ini untuk meminimalisasi kerugian karena musim yang tidak menentu. Misalnya ketika banjir, pupuk kerendem terus ilang. Ketika kekeringan, sawah jadi puso atau gagal panen. Kalau harga yang kita subsidi, nanti petani bakal berlomba-lomba dan menjaga supaya panen tidak rusak," ujar dia.

Dikatakan Sumarjati, dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 5 Maret 2014, sebenarnya BAKN telah menyampaikan sejumlah rekomendasi yang bisa dilakukan terkait temuan-temuan tersebut. Selain penyempurnaan terhadap sejumlah peraturan perundangan, BAKN juga meminta pemerintah memperkuat sistem pengendalian internal (SPI) di setiap instansi.

Namun demikian, Sumarjati khawatir rekomendasi BAKN ini lambat ditindaklanjuti. Hal ini misalnya terjadi dalam kasus pengadaan sarana dan prasarana pembuatan vaksin flu burung yang merugikan keuangan negara hingga Rp 468 miliar.

"Pada 2012 kita rekomendasikan kepada Ketua DPR agar kasus ini diteruskan KPK. Tapi sampai hari ini belum ada proses hukum signifikan yang dilakukan KPK," tandasnya. (Deo/S-25)